



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERCEPATAN REGISTRASI IZIN EDAR PRODUK SUSU IKAN

Rahmi Yuningsih
Analisis Legislatif Ahli Muda
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Salah satu program prioritas Presiden terpilih, Prabowo Subianto, adalah pemberian makan bergizi gratis yang mencakup makan siang dan susu. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun terdapat kekhawatiran dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu ketersediaan susu sapi dalam negeri yang terkendala oleh terbatasnya jumlah populasi sapi perah di daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama tahun 2022 produksi susu segar dalam negeri hanya mencapai 968.980 ton atau sekitar 22% dari total kebutuhan nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Oleh karenanya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) mengusulkan agar susu ikan digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada susu sapi impor. Sedangkan Wakil Menteri Pertanian menilai susu ikan dapat menjadi substitusi susu sapi pada program makan bergizi gratis.

Susu ikan diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kemenkop UKM di Indramayu, Jawa Barat pada Agustus 2023. Pada dasarnya susu ikan bukanlah susu atau sekresi cairan sebagaimana yang dihasilkan oleh hewan mamalia yang memiliki kelenjar susu. Susu ikan merupakan produk pangan inovatif yang terbuat dari ekstraksi protein ikan. Ekstraksi diproses dengan campuran bahan tambahan pangan dan dibentuk menjadi bubuk sebagai minuman berprotein tinggi. Susu ikan mengandung asam lemak omega-3 yang berguna untuk perkembangan otak. Tingkat penyerapan protein dari susu ikan mencapai 93,61%, dan terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan berat badan, daya cerna, serta penyerapan protein. Oleh karenanya, dapat digunakan untuk pemberantasan masalah gizi masyarakat. Dengan kandungan gizinya, susu ikan dapat digunakan sebagai alternatif menu pada program pemberian makan bergizi gratis namun bukan sebagai substitusi susu sapi.

Terkait dengan besarnya potensi penggunaan susu ikan pada program pemberian makan bergizi gratis, Kemenkop UKM serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepakat untuk mempercepat proses registrasi izin edar produk susu ikan. Saat ini, susu ikan yang beredar di pasar merupakan produk dari industri rumah tangga pangan sehingga hanya memiliki sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikat halal. Untuk meningkatkan produksi dan memperluas cakupan pemasaran, produsen susu ikan perlu meningkatkan skala usaha menjadi industri pangan, mengurus perizinan berusaha industri, dan mengurus registrasi pangan olahan untuk mendapatkan nomor izin edar. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan, setiap pangan yang dijual secara retail atau dijual langsung kepada konsumen akhir, wajib memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label pangan. Adapun kriteria tersebut termasuk penerapan cara produksi dan cara peredaran yang baik serta terpenuhinya persyaratan cemaran biologis, kimawi, residu, dan lainnya. Percepatan registrasi dapat dilakukan melalui sistem jemput bola yaitu BPOM mendatangi produsen pembuat susu ikan, registrasi secara daring, dan melibatkan

laboratorium milik BPOM untuk mempercepat pengujian keamanan produk. Dalam proses registrasi tersebut, BPOM perlu memperhatikan terminologi yang digunakan agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat terkait penyebutan kata susu. BPOM juga perlu memastikan produk tersebut telah lulus pengujian keamanan, mutu, dan gizi termasuk adanya kemungkinan kandungan alergen.

Atensi DPR

Susu ikan yang diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kemenkop UKM pada Agustus 2023 mempunyai potensi besar untuk digunakan sebagai alternatif menu pada program pemberian makan bergizi gratis, tetapi bukan sebagai substitusi susu sapi. Komisi IX DPR RI memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi program pemberian makan bergizi gratis terutama yang terkait dengan keamanan produk pangan, di antaranya:

1. memastikan pemerintah mendorong pelaku usaha agar melakukan registrasi produk susu ikan ke BPOM dan menggunakan terminologi selain kata susu;
2. memastikan pemerintah menerapkan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap produk susu ikan;
3. mendorong pemerintah melakukan pengambilan sampel terhadap susu ikan guna uji alergen, dan keamanan pangan lainnya; serta
4. mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi bahwa susu merupakan makanan tambahan dalam pemenuhan gizi, tetapi yang terpenting adalah memastikan asupan gizi seimbang.

Sumber

cnnindonesia.com, 20 September 2024; dan
Kompas, 13, 18, 19 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023